

Laporan Kinerja
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang Balikpapan

Menuju Stabilitas Ekonomi
Tetap Optimis & Waspada

2023



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan tahun 2023 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja KPKNL Balikpapan sepanjang tahun 2023 dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang kepada *stakeholder* dan masyarakat pengguna layanan. LAKIN tahun 2023 ini merupakan capaian kinerja tahun keempat dalam periode Rencana Strategis KPKNL Balikpapan tahun 2020-2024. LAKIN 2023 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor 4493/KN.1/2023 tanggal 29 Desember 2023 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2023.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian terhadap 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU), rata-rata tingkat pencapaian sebesar 109,39%. Dari capaian tersebut seluruh IKU berwarna hijau. KPKNL Balikpapan berkomitmen untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi tantangan kerja tahun anggaran 2024 sehingga capaian kinerja akan terus meningkat.

Kami harapkan LAKIN ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Balikpapan. Penyusunan laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta sebagai bahan evaluasi bagi KPKNL Balikpapan untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang. Kepada semua pegawai yang telah menyumbangkan karsa dan karya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja KPKNL Balikpapan kami berikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kiranya Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua serta pihak-pihak yang telah membantu penyusunan LAKIN ini.

Balikpapan, 1 Februari 2024
Kepala Kantor,



Adi Suharna
NIP 19720716 199403 1 003

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Pengantar	i
Daftar Isi	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
B. Peran Strategis Organisasi	5
C. Isu Strategis Organisasi	6
D. Sistematika Laporan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis	8
B. Perjanjian Kinerja	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN	14
A. Capaian Kinerja Organisasi	14
B. Kinerja Lainnya	28
C. Realisasi Anggaran	29
BAB IV PENUTUP	31
Lampiran	32

IKHTISAR EKSEKUTIF

A. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan (KPKNL Balikpapan) mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengelolaan kekayaan negara, pelayanan penilaian, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang kepada *stakeholders*.

Akuntabilitas kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan dalam mengelola kekayaan negara, piutang negara dan lelang disampaikan melalui Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Balikpapan tahun 2023.

Dengan berpedoman pada nilai-nilai Kementerian Keuangan segenap jajaran KPKNL Balikpapan selalu siap mewujudkan Visi DJKN yaitu: **“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka Mendukung Visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, Serta untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 5 misi yaitu:

1. Mengoptimalkan Pengelolaan Kekayaan Negara
2. Mengamankan Kekayaan Negara Secara Fisik, Administrasi, dan Hukum
3. Meningkatkan Tata Kelola dan Nilai Tambah Pengelolaan Kekayaan Negara
4. Menghasilkan Nilai Kekayaan Negara yang Wajar dan Dapat Dijadikan Acuan dalam Berbagai Keperluan
5. Mewujudkan Lelang Yang Efisien, Transparan, Akuntabel, Adil, dan Kompetitif Sebagai Instrumen Jual Beli yang Mampu Mengakomodasi Kepentingan Masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategi organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL adalah terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi *stakeholder*.

Seiring dengan perjalanan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan mengacu pada visi dan misi tersebut, serta untuk mencapai tujuan yang akan diraih, maka dirumuskan sasaran strategis dengan menggunakan pendekatan *Balance Scorecard*

(BSC) yang dituangkan dalam peta strategis. Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan penilaian terhadap indikator kinerja utama (IKU) yang telah diidentifikasi untuk mencapai sasaran strategis dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi KPKNL Balikpapan tahun 2023.

B. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan pengukuran dengan menggunakan pendekatan BSC, rata-rata tingkat pencapaian terhadap 11 (sebelas) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) IKU Kemenkeu *Three* tahun 2023 sebesar 109,39% dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	84,85%	84,85%
	Persentase Produktifitas Lelang	80%	131,01%	120%
	Indeks Integritas	88,67	100,56%	100,56%
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	99,72%	99,72%
	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	100,50%	100,50%
Kepuasan Pengguna Layanan Yang Tinggi	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	100%	106,40%	106,40%
Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	Pengelolaan Barang Milik Negara yang Optimal	84%	118,78%	118,78%
	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100%	159,09%	120%

	(BKPN)			
Pelaksanaan Penilaian Yang Akuntabel Dan Profesional	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	200%	120%
	Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	134,30%	120%
Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase Pelaksanaan Lelang Online	90%	108,39%	108,39%
	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	134,60%	120%
Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%	107,67%	107,67%
Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif	Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik	100	120%	120%
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%	97,78%	97,78%
	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	248,93%	120%
	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	15%	200%	120%
Penguatan Pengawasan- Pengendalian Internal yang Efektif	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	60	163,32%	120%

Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	121,34%	120%
	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%	116,25%	116,25%

C. PERMASALAHAN DAN LANGKAH-LANGKAH ANTISIPATIF

Dalam pencapaian kinerja tahun 2023 KPKNL Balikpapan menghadapi berbagai kendala diantaranya sebagai berikut ;

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Penilai :
 - Ketersediaan obyek pembanding yang terbatas;
 - Nilai taksiran yang diajukan oleh pemohon melampaui nilai wajar yang seharusnya;
 - Keterbatasan jumlah Fungsional Penilai pada KPKNL Balikpapan yang tidak sebanding dengan beban kerja yang dilimpahkan. Kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan penilaian tidak sesuai aturan yang berlaku;
 - Usulan nilai yang diajukan oleh Satuan Kerja pada permohonan penilaian dalam rangka pemindahtanganan atau pemanfaatan tidak mempunyai dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - SOP penyelesaian layanan penilaian yang efektif dan efisien pada beberapa permohonan penilaian kurang optimal. Hal ini disebabkan faktor kesiapan pemohon penilaian dalam pendampingan survei lapangan sehingga survei lapangan tidak dapat segera dilaksanakan setelah dokumen permohonan penilaian diterima KPKNL Balikpapan.

Saran/langkah antisipatif :

- Mencari obyek pembanding dari luar wilayah kerja yang dianggap sebanding dan relevan dengan obyek yang sedang dinilai;
- Pemberian edukasi terkait perhitungan nilai taksiran yang benar (metode penelitian taksiran);
- Pembentukan Tim Penilai yang terdiri dari Fungsional Penilai dan pegawai dari seksi lain. Penilai Pemerintah melaksanakan edukasi terkait permohonan penilaian dan membuat daftar kelengkapan dokumen permohonan penilaian sesuai peraturan yang berlaku (PMK Nomor 173/PMK.06/2020 Tentang

Penilaian Oleh Penilai Pemerintah Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara);

- Dalam rangka optimalisasi ketergunaan nilai/daya serap pasar dan mengantisipasi usulan nilai tidak sesuai dengan kondisi pasar maka Penilai Pemerintah mengadakan kegiatan edukasi terkait metode penilaian secara singkat dan ringkas sehingga Satuan Kerja mempunyai dasar kertas kerja saat mengajukan usulan nilai dalam rangka pemindahtanganan atau pemanfaatan;
- Melaksanakan konsultasi dan koordinasi pra permohonan penilaian dengan satuan kerja untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan penilaian serta kesepakatan kesiapan jadwal survei lapangan.

b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara :

- Realisasi nominal PNBP yang berasal dari pemanfaatan berupa sewa relatif kecil apabila dibandingkan dengan target;
- Beberapa satuan kerja belum menindaklanjuti PNBP atas pengelolaan BMN di wilayah kerjanya;
- Penurunan potensi calon penyewa karena dampak pandemi COVID-19;
- Adanya kepentingan internal dari pihak satuan kerja yang seringkali menjadi hambatan bagi KPKNL Balikpapan dalam memproses tindak lanjut permohonan.

Saran/langkah antisipatif :

- Koordinasi intensif dengan satuan kerja baik melalui komunikasi via media elektronik maupun peninjauan lapangan untuk menggali potensi BMN yang dapat diajukan pemanfaatannya;
- Menghimbau satuan kerja untuk dapat memperluas publikasi terkait adanya penyewaan BMN kepada masyarakat untuk menarik calon penyewa;
- Menegaskan kembali kepada satuan kerja terkait prosedur layanan di KPKNL Balikpapan sebagai bentuk respon terhadap potensi konflik kepentingan satuan kerja yang bertentangan dengan peraturan dan SOP terkait pengelolaan BMN yang berlaku di KPKNL Balikpapan.

c. Kelompok Jabatan Fungsional Pelelang

- Daya beli masyarakat terhadap lelang menurun karena pengaruh Covid-19;
- Agunan lelang yang tidak *marketable*;
- Agunan masih dihuni oleh debitur/keluarganya/pihak ketiga;
- Maraknya gugatan terhadap lelang eksekusi yang diselenggarakan oleh KPKNL Balikpapan sehingga membuat menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa lelang eksekusi kurang aman dan terpercaya sehingga menyebabkan berkurangnya minat masyarakat terhadap lelang.

- Adanya debitur yang melakukan pemblokiran setelah atau sebelum pelaksanaan lelang, sehingga pasca pelaksanaan lelang tidak dapat dilakukan dengan segera balik nama oleh pembeli lelang.
- Adanya potensi gugatan dari pembeli lelang karena setelah melakukan pelunasan, pajak dan bea lelang proses balik nama tertunda karena adanya gugatan dari penanggung hutang.

Saran/langkah antisipatif :

- Menggencarkan pemasaran lelang melalui katalog lelang maupun situs info lelang pemohon;
- Membangun komunikasi dan pemahaman lelang yang baik dengan masyarakat umum;
- Membangun koordinasi yang baik dengan BPN/PN dan mitra kerja KPKNL Balikpapan terkait lelang;
- Melakukan mitigasi resiko terkait lelang eksekusi melalui peningkatan kualitas pemeriksaan berkas dan berkoordinasi dengan pihak Bank mengenai kondisi objek lelang; Melakukan pengurusan SKPT pada saat beberapa sebelum pelaksanaan lelang untuk mengetahui adanya gugatan dari pihak kedua /debitur atau pihak ketiga.
- Memberikan informasi tentang kondisi obyek lelang secara lebih lengkap kepada calon pembeli lelang.

d. Seksi Pengurusan Piutang Negara :

- Penanggung hutang/penjamin hutang merupakan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang anggotanya sudah tidak diketahui keberadaannya dan tidak mempunyai kemampuan untuk membayar hutangnya;
- Penanggung hutang/ahli waris tidak mengakui hutang karena merasa telah melakukan pembayaran kepada bank asal yang menjadi Bank Beku Operasi (BBO), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), yang diurus oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat PKN (sebelumnya Dit. PKNSI);
- Hutang tidak didukung dengan Barang Jaminan;
- Penanggung Hutang ada yang Berada di Luar Wilayah Kerja KPKNL Balikpapan, sehingga sulit untuk melakukan penagihan atau memastikan keadaan dan usaha Debitur saat ini;
- Penyerah Piutang sudah tidak ada/tidak diketemukan lagi dan bukti-bukti pendukung sisa hutang sangat minim.

Saran/langkah antisipatif :

- Melakukan koordinasi dengan anggota PUPN unsur kejaksaan dan kepolisian;

- Melakukan koordinasi dengan penyerah piutang dalam hal ini Dit. PKN;
- Pemeriksaan Usaha dan Harta Kekayaan Debitur;
- Melakukan Kerja sama dengan penyerah Piutang untuk menelusuri keberadaan debitur.

BAB I | Pendahuluan



Suara burung Enggang yang menggelegar sebagai pertanda baik akan datangnya berkah. Seperti halnya Kemenkeu yang senantiasa memberikan harapan baik dan positif bagi perekonomian Indonesia



BAB I PENDAHULUAN

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KPKNL BALIKPAPAN

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Balikpapan merupakan salah satu kantor vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di bawah Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara, yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang pengelolaan negara, penilaian, piutang negara dan pelayanan lelang.

Dalam melaksanakan tugas tersebut KPKNL menyelenggarakan fungsi:

- a. Inventarisasi, administrasi, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- b. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
- d. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
- e. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. Pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- h. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
- i. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
- j. Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
- k. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
- l. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
- m. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
- n. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang dilakukan, KPKNL Balikpapan didukung oleh sumber daya manusia dengan komposisi sebagai berikut:

a. Berdasarkan Jabatan

Jumlah Pegawai	Es I	Es II	Es III	Es IV	Pelaksana	Jabfung Pelelang	Jabfung Penilai	Jabfung Pranata APBN
36	-	-	1	5	22	4	3	1

b. Berdasarkan tingkat pendidikan

Jumlah Pegawai	S2	S1/D IV	D III	D I	SMA
36	4	16	10	-	4

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang kekayaan negara, pelayanan penilaian, piutang negara dan pelayanan lelang, KPKNL Balikpapan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dengan didukung oleh 1 (satu) Subbagian, 4 (empat) Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing bidang. Adapun struktur organisasi KPKNL terdiri dari :

a. Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan, perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara di serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL.

b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/daftar barang milik negara/kekayaan negara.

c. Seksi Piutang Negara

Seksi Piutang Negara mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.

d. Seksi Hukum dan Informasi

Seksi Hukum dan Informasi mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi

dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.

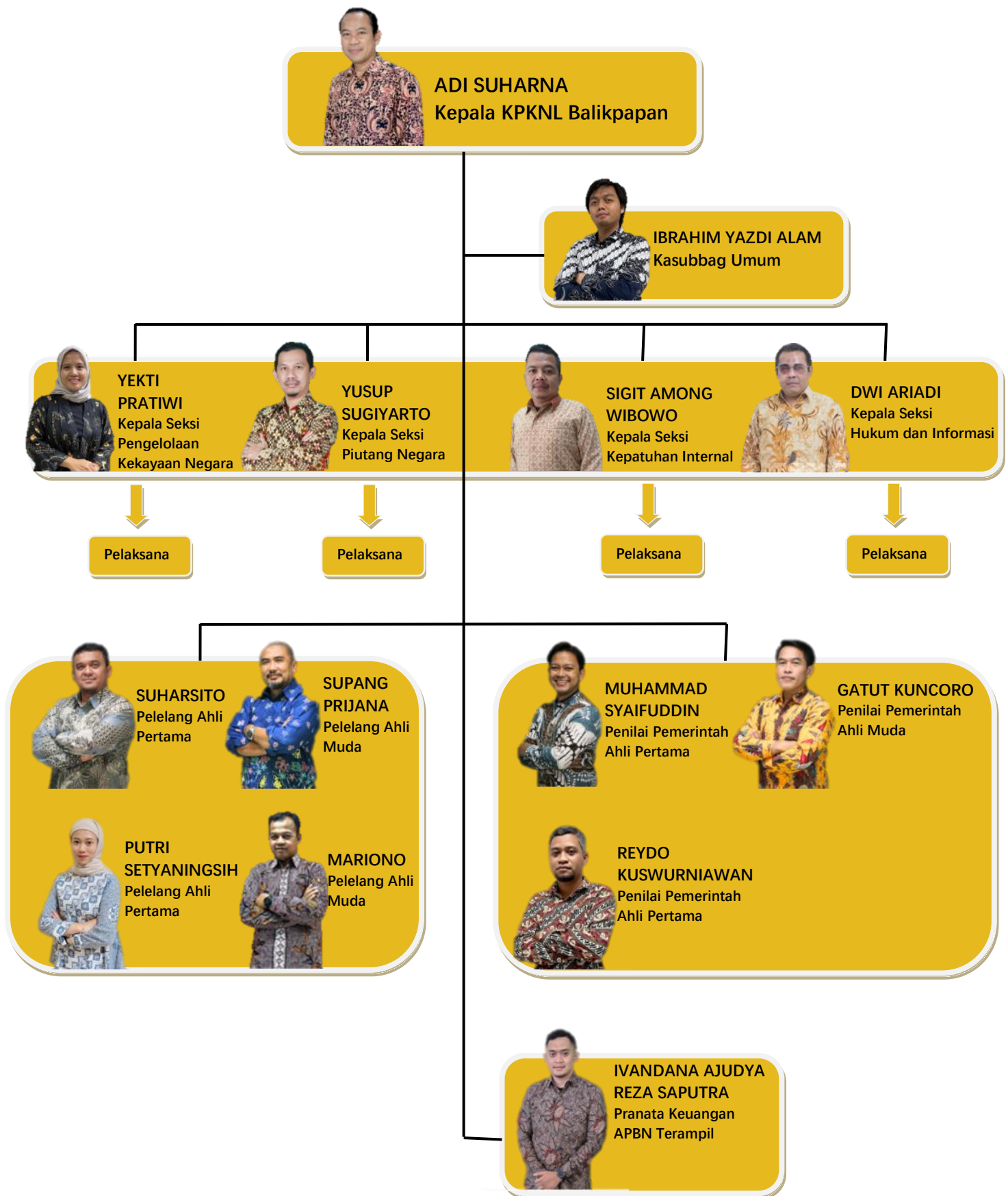
e. Seksi Kepatuhan Internal

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Terdapat tiga jabatan fungsional di KPKNL Balikpapan, yaitu Pelelang, Penilai Pemerintah, dan Pranata Keuangan APBN. Jabatan Fungsional Pelelang adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan lelang Eksekusi, Lelang Non Eksekusi Wajib dan Lelang Non Eksekusi Sukarela. Sedangkan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang penilaian properti dan/ atau bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN adalah jabatan yang memiliki ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengelolaan keuangan APBN meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran, kebendaharaan, pengelolaan administrasi belanja pegawai, dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi.

Adapun bagan struktur organisasi KPKNL Balikpapan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :



B. PERAN STRATEGIS KPKNL BALIKPAPAN

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang, KPKNL Balikpapan memiliki peran strategis sebagai berikut :

1. Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL Balikpapan memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna kekayaan negara terutama difokuskan pada utilisasi kekayaan negara dan pembinaan serta penatausahaan kekayaan negara. Sebagai aset manager, KPKNL Balikpapan mengemban tugas untuk menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN, yaitu melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara, penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

KPKNL Balikpapan sebagai kantor operasional di daerah yang melayani langsung satuan kerja di lingkungan Kementerian / Lembaga di wilayah kerja KPKNL Balikpapan dengan memberikan layanan di bidang pengelolaan kekayaan negara antara lain Pengukuran SBSK, Portofolio Aset, Sertifikasi BMN serta persetujuan/penolakan permohonan pengelolaan kekayaan negara.

2. Penilaian Kekayaan Negara

Penilaian terhadap kekayaan negara yang merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara setelah dilakukan inventarisasi. Hasil penilaian kekayaan negara antara lain digunakan untuk penyusunan rencana pemerintah pusat, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN, penerbitan SBSN dan pengurusan piutang negara. Dengan demikian hasil penilaian juga dapat membantu mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *The Highest and The Best Use*.

3. Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan menjadikan lelang sebagai instrumen jual beli yang dikenal secara umum sebagaimana transaksi pasar pada umumnya. Lelang juga merupakan pelaksanaan eksekusi terhadap suatu putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Lelang mempunyai nilai lebih apabila dibandingkan dengan transaksi

jual beli biasa, yaitu transparan, akuntabel, kompetitif, efisien dan lebih menjamin kepastian hukum. Dalam setiap pelaksanaan lelang dibuat Risalah Lelang yang merupakan akta otentik yang berfungsi sebagai akta *van transport* untuk kepentingan peralihan hak.

4. Pengurusan Piutang Negara

Dalam melaksanakan pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang, KPKNL memperoleh hasil penerimaan negara bukan pajak yang berupa Biaya Administrasi pengurusan piutang negara dan bea lelang yang selanjutnya disetorkan ke kas negara sesuai dengan *Standard Operating Procedure* yang berlaku.

C. ISU STRATEGIS ORGANISASI

Perubahan paradigma pengelolaan kekayaan negara dari *asset administration* (penatausahaan aset) menjadi *asset manager* (manajer aset) menuntut peran dan tanggung jawab yang lebih besar dari Pengelola Barang (Kementerian Keuangan c.q DJKN) untuk mengelola kekayaan negara lebih optimal dan akuntabel. Salah satunya melalui optimalisasi pemanfaatan aset potensial dalam rangka peningkatan utilisasi aset, peningkatan penerimaan negara, dan mewujudkan APBN yang efektif, efisien, dan optimal.

Pada tahun 2023, KPKNL Balikpapan menjadi salah satu unit kantor vertikal DJKN yang turut berpartisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), program tersebut dilaksanakan dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, sehingga banyak hal yang harus disiapkan oleh KPKNL Balikpapan selama tahun 2023 untuk memenuhi penilaian PEKPPP yang meliputi enam aspek, yakni kebijakan pelayanan publik, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan publik. Pada tanggal 21 November 2023 KemenPAN-RB memberikan penghargaan Pelayanan Prima pada Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik pada KPKNL Balikpapan.

Selain itu, Pembangunan Ibu Kota Negara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan wilayah kerja KPKNL Balikpapan menjadikan Kota Balikpapan dan KPKNL Balikpapan khususnya sebagai titik awal dalam proses pengawalan Pembangunan IKN sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih dalam hal penyediaan informasi BMN dan hal hal lainnya yang dibutuhkan dalam ranah tugas dan fungsi DJKN selaku Pengelola Kekayaan Negara.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Untuk memudahkan dalam memahami isi laporan ini, maka digunakan sistematika pelaporan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

BAB II Perencanaan Kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan

BAB IV Penutup

Lampiran

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan selama tahun 2023, KPKNL Balikpapan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti diuraikan dalam BAB II Laporan ini.

Penyusunan Laporan Kinerja KPKNL Balikpapan Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja KPKNL Balikpapan di tahun yang akan datang.

BAB II | Perencanaan Kinerja



Kepakan sayap Enggang yang tebal melambangkan perlindungan. Selain itu, daya jelajah burung Enggang cukup luas, yaitu mencapai 100 km². Kemampuan ini sangat menguntungkan bagi regenerasi hutan karena buah serta biji yang dimakan dapat tersebar pada luasan tersebut. Seperti halnya APBN yang dikeluarkan oleh Kemenkeu dapat tersalurkan sepenuhnya untuk masyarakat.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Renstra menjadi alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. visi DJKN, yaitu:

“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka Mendukung Visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, Serta untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat”

Untuk merealisasikan visi tersebut, DJKN menetapkan misi sebagai berikut.

- 1. Mengoptimalkan Pengelolaan Kekayaan Negara**
- 2. Mengamankan Kekayaan Negara Secara Fisik, Administrasi, dan Hukum**
- 3. Meningkatkan Tata Kelola dan Nilai Tambah Pengelolaan Kekayaan Negara**
- 4. Menghasilkan Nilai Kekayaan Negara yang Wajar dan Dapat Dijadikan Acuan dalam Berbagai Keperluan**
- 5. Mewujudkan Lelang Yang Efisien, Transparan, Akuntabel, Adil, dan Kompetitif Sebagai Instrumen Jual Beli yang Mampu Mengakomodasi Kepentingan Masyarakat.**

Atas dasar visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan yang hendak dicapai oleh DJKN untuk periode 2020-2024 adalah:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien; dan
4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, DJKN menentukan sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan;
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa;
3. Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi;
4. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal;
5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional;
6. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif;
7. Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif;
8. Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif;
9. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal;
10. Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif;
11. Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi.

Kesebelas sasaran yang hendak dicapai tersebut dapat tergambar dalam peta strategis KPKNL Balikpapan tahun 2023 sebagai berikut:

Perspective	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Unggulan
<i>Stakeholder Perspective</i> 30 %	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang
		Persentase Produktivitas Lelang
		Indeks Integritas
<i>Customer Perspective</i> 20 %	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Realisasi Pokok Lelang
		Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan
<i>Internal Process Perspective</i> 25 %	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan BMN
		Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)
	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian
		Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien
	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase Pelaksanaan Lelang Online
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)
	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara
	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif	Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik
<i>Learning & Growth Perspective</i> 25 %	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran
		Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

		Deviasi Data PNB Fungsional DJKN
	Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif
	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko
		Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, KPKNL Balikpapan melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Program peningkatan terselenggaranya tertib pengelolaan dan administrasi kekayaan negara;
- b. Program peningkatan tersajinya informasi jumlah dan nilai wajar kekayaan negara;
- c. Program peningkatan kualitas pelayanan pengurusan piutang negara dan pengelolaan barang jaminan;
- d. Program peningkatan kualitas pelayanan lelang;
- e. Program peningkatan kualitas penyajian informasi dan penatausahaan hasil pengurusan piutang negara dan lelang serta pengoptimalan penanganan perkara.

B. PERJANJIAN KINERJA

Sebagai implementasi pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) KPKNL Balikpapan telah membuat penetapan kinerja awal tahun 2023 yang terdiri dari 11 (sebelas) sasaran strategis dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama sesuai Perjanjian Kinerja Nomor PK-01/WKN.13/2023 tanggal 31 Januari 2023 sesuai rincian sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023
(1)	(2)	(3)
Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
	Persentase Produktivitas Lelang	80%
	Indeks Integritas	88,67
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	100%
Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan BMN	84%
	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%

	Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70
Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase Pelaksanaan Lelang Online	90%
	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%
Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif	Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik	100
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%
	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%
	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%
Penguatan Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Efektif	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	60
Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80
	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%

BAB III | Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan



Dengan hinggapnya burung Enggang di pohon Batang Garing yang merupakan simbol dari Pohon Kehidupan oleh masyarakat Dayak, burung Enggang dapat mengawasi gerak gerik mangsa dan buah-buahan yang sudah masak, layaknya Kemenkeu yang selalu mengawasi dan waspada terhadap segala kemungkinan di perekonomian Indonesia.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja KPKNL Balikpapan tahun 2023 dilakukan melalui evaluasi dan pengukuran pencapaian sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada tahun 2023 KPKNL Balikpapan telah menetapkan 11 sasaran strategis :

1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan;
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa;
3. Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi;
4. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal;
5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional;
6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif;
7. Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif;
8. Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif;
9. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal;
10. Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif;
11. Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi;

Untuk mencapai 11 Sasaran Strategis tersebut, pada tahun 2023 KPKNL Balikpapan menetapkan 20 (dua puluh) IKU. Berdasarkan hasil pengukuran, rata-rata tingkat pencapaian sasaran pada tahun 2023 sebesar 109,39%, dengan rincian pencapaian IKU *Kemenkeu Three* sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	84,85%	84,85%
	Persentase Produktivitas Lelang	80%	131,01%	120%

Berkelanjutan	Indeks Integritas	88,67	100,56%	100,56%
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	99,72%	99,72%
	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	100,50%	100,50%
Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	100%	106,40%	106,40%
Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan BMN	89,33%	118,78%	118,78%
	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	159,09%	120%
Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	200%	120%
	Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	134,30%	120%
Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase Pelaksanaan Lelang Online	90%	108,39%	108,39%
	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	134,30%	120%
Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%	107,67%	107,67%

Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif	Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik	100	120%	120%
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%	97,78%	97,78%
	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	248,93%	120%
	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	15%	200%	120%
Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	60	163,32%	120%
Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	121,34%	120%
	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%	116,25%	116,25%

K-Three	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan							
	1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang							
T/R	Q1	Q2	SI	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target Kinerja	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	12,72%	29,06%	29,06%	41,70%	41,70%	84,85%	84,85%	
Capaian Kontrak Awal								

K-Three	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan							
	1b-CP Persentase Produktivitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	SI	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target Kinerja	30%	45%	45%	60%	60%	80%	80%	Max/TLK
Realisasi	55,4%	67,03%	67,03%	83,39%	83,39%	104,81%	104,81%	
Capaian Kontrak Awal								

K-Three	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan							
	1c-CP Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	SI	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target Kinerja						88,67	88,67	Max/TLK
Realisasi						89,17	89,17	
Capaian Kontrak Awal								

K-Three	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	SI	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target Kinerja	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	10,77%	25,74%	25,74%	41,75%	41,75%	99,72%	99,72%	
Capaian Kontrak Awal								

K-Three	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan							
	2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	SI	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target Kinerja	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	25,84%	37,06%	37,06%	58,52%	58,52%	100,50%	100,50%	
Capaian Kontrak Awal								

K-Three	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							
	3a-CP Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan							
T/R	Q1	Q2	SI	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target Kinerja	3%	7%	7%	11%	11%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	5,11%	10,23%	10,23%	11,93%	11,93%	106,4%	106,4%	
Capaian Kontrak Awal								

K-Three	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
	4a-CP Tingkat Optimalisasi Pengelolaan BMN							
T/R	Q1	Q2	SI	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target Kinerja	12%	40,67%	40,67%	57,50%	58,93%	84%	84%	Max/TLK
Realisasi	59,3%	90,92%	90,92%	58,93%	58,93%	99,78%	99,78%	
Capaian Kontrak Awal								

K-Three	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
	4b-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)							
T/R	Q1	Q2	SI	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target Kinerja	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	16,67%	77,78%	77,78%	77,27%	77,27%	159,09%	159,09%	
Capaian Kontrak Awal								

K-Three	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
	5a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian							
T/R	Q1	Q2	SI	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target Kinerja	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Max/TLK
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Capaian Kontrak Awal								

K-Three	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
	5b-CP Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien							
T/R	Q1	Q2	SI	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target Kinerja	70	70	70	70	70	70	70	Max/TLK
Realisasi	91,58	95,97	95,97	93,45	93,45	94,01	94,01	
Capaian Kontrak Awal								

K-Three	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	6a-CP Persentase Pelaksanaan Lelang Online							
T/R	Q1	Q2	SI	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target Kinerja	57%	67%	67%	78,5%	78,5%	90%	90%	Max/TLK
Realisasi	100%	97,98%	97,98%	96,92%	96,92%	94,81%	94,81%	
Capaian Kontrak Awal								

K-Three	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif							
	6b-CP Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN							
T/R	Q1	Q2	SI	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target Kinerja	15%	15%	15%	ADENDUM				Max/TLK
Realisasi	0%	0%	0%					
Capaian Kontrak Awal								

K-Three	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif (ADENDUM)							
	6b-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	Q2	SI	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target Kinerja	15%	15%	15%	75%	75%	100%	15%	Max/TLK
Realisasi				75,52%	75,52%	134,6%	134,6%	
Capaian Kontrak Awal								

K-Three	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif							
	7a-CP Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara							
T/R	Q1	Q2	SI	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target Kinerja	-	50%	50%	50%	50%	86%	86%	Max/TLK
Realisasi		67,90%	67,90%	74,07%	74,07%	92,59%	92,59%	
Capaian Kontrak Awal								

K-Three	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif							
	8a-N Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik							
T/R	Q1	Q2	SI	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target Kinerja	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian Kontrak Awal								

K-Three	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							
	9a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran							
T/R	Q1	Q2	SI	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target Kinerja	95,5	95,5	95,5	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	95,5	95,5	99,85	113,52	113,52	98,40	98,40	
Capaian Kontrak Awal								

K-Three	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							
	9b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan							
T/R	Q1	Q2	SI	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target Kinerja						100%	100%	Max/TLK
Realisasi						248,93%	248,93%	
Capaian Kontrak Awal								

K-Three	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							
	9c-N Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN							
T/R	Q1	Q2	SI	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target Kinerja	ADENDUM			15%	15%	15%	15%	Max/TLK
Realisasi				0%	0%	0%	0%	
Capaian Kontrak Awal								

K-Three	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif							
	10a-N Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
T/R	Q1	Q2	SI	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target Kinerja						60	60	Max/TLK
Realisasi						97,99	97,99	
Capaian Kontrak Awal								

K-Three	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
	11a-N Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko							
T/R	Q1	Q2	SI	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target Kinerja						80	80	Max/TLK
Realisasi						97,21	97,21	
Capaian Kontrak Awal								

K-Three	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan							
	11b-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai (30 JP)							
T/R	Q1	Q2	SI	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target Kinerja	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	72%	120%	120%	120%	120%	116,25%	116,25%	
Capaian Kontrak Awal								

Evaluasi dan analisis kinerja KPKNL Balikpapan kegiatan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan.

1a-CP IKU : Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

IKU Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang dengan target Rp18.287.500.000 memiliki capaian sebesar Rp15.517.135.522 atau 84,85% dari target yang telah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

- PNBP BMN dengan target sebesar Rp9.725.000.000,00 dengan capaian Rp5.213.314.179,00 atau 53,61%
- PNBP Piutang Negara dengan target sebesar Rp62.500.000,00 dengan capaian sebesar Rp66.235.977,00 atau 105,98%
- PNBP Lelang dengan target sebesar Rp8.500.000.000,00 dengan capaian sebesar Rp10.237.585.366,00 atau 120,44%

Berdasarkan uraian di atas, persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang tidak tercapai sebesar 15,15%.

Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan target PNBP pengelolaan BMN pada tahun 2023 yang didasarkan pada realisasi penerimaan PNBP pada tahun 2022 dimana pada tahun 2022 terdapat kegiatan lelang yang bersifat insidental yaitu pelaksanaan Lelang Eksekusi Rampasan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Balikpapan telah melakukan upaya pemenuhan target penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berupa penggalan potensi berupa sewa atau penjualan BMN dengan kondisi rusak/rusak berat yang dimiliki oleh satuan kerja KPKNL Balikpapan secara optimal.

Adapun realisasi Penerimaan Negara dari Piutang Negara pada KPKNL Balikpapan berhasil mencapai target. Berdasarkan pada uraian di atas, penerimaan

negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang di KPKNL Balikpapan didominasi oleh PNBP yang berasal dari kegiatan lelang. Tercatat bahwa realisasi PNBP Lelang cukup signifikan tahun 2023 dikarenakan KPKNL Balikpapan berhasil melaksanakan lelang kapal milik Pertamina pada Triwulan III tahun 2023.

1b-CP IKU : Persentase Produktivitas Lelang

IKU Persentase Produktivitas Lelang memiliki target sebanyak 748 frekuensi dan telah terealisasi sebesar 104,68% atau terdapat 783 frekuensi lelang yang telah dilaksanakan oleh KPKNL Balikpapan selama tahun 2023. Adapun rincian frekuensi lelang tersebut adalah sebagai berikut.

No	Nama Pelelang	Laku	TAP	Wanprestasi	Jumlah
1.	Supang Prijana	44	132	1	177
2.	Mariono	22	98		120
3.	Suharsito	78	149	1	228
4.	Putri Setyaningsih	6	2		8
5.	Ridwan Herdianto	74	122	2	198
6.	Doan Octanary	12	40		52
	Jumlah	236	543	4	
	Total				783

1c-CP IKU : Indeks Integritas

IKU Indeks Integritas bertujuan untuk mengukur tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal). Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Survei Penilaian Integritas. Adapun realisasi indeks integritas KPKNL Balikpapan pada tahun 2023 adalah sebesar 89,17 atau 100,56% dari target yang telah ditetapkan sebesar 88,67.

2. Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

2a-CP IKU : Persentase Realisasi Pokok Lelang

IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang dilaksanakan melalui pengelolaan lelang yang optimal dengan melaksanakan kegiatan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBP lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL dalam hal ini Jabatan Fungsional Pelelang dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang.

Realisasi capaian pokok lelang pada KPKNL Balikpapan sebesar Rp328.592.521.905 atau 99,72% dengan rincian capaian Pokok Lelang Kelas I sebesar

Rp202.120.635.205 dan Pokok Lelang Pegadaian sebesar Rp126.471.886.700. Capaian tersebut telah melebihi target yang ditetapkan yakni Rp329.500.000.000, dengan rincian target Pokok Lelang Kelas I sebesar Rp95.480.000.000; dan target Pokok Lelang Pegadaian sebesar Rp234.020.000.000.

2b-CP IKU : Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

IKU Persentase Jumlah Penurunan Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengelolaan piutang negara terhadap BKPN lama. Capaian IKU Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara pada KPKNL Balikpapan tahun 2023 adalah sebesar Rp1.859.273.064 atau 100,50% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp1.850.000.000.

3. Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi

3a-CP IKU : Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan

IKU Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan bertujuan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan kepada pengguna layanan. Pada tahun 2023 KPKNL Balikpapan memiliki target 100% atau 106,4% dari target.

4. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Optimal

4a-CP IKU : Tingkat Optimalisasi Pengelolaan BMN

Target IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan BMN pada tahun 2023 sebesar 84% berhasil mendapatkan capaian sebesar 99,78% dengan rincian capaian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK sebesar 64,07% (218 NUP) dari target sebesar 68% (218 NUP) dan capaian Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipatkan sebesar 210 NUP atau 135,48% dari target sebesar 155 NUP.

4b-CP IKU : Persentase Penyelesaian (Berkas Kasus Piutang Negara) BKPN

IKU Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengelolaan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN. Target IKU Persentase Penyelesaian (Berkas Kasus Piutang Negara) BKPN pada KPKNL Balikpapan tahun 2023 adalah sebesar 22 dan berhasil meraih capaian sebesar 35 atau 159,09%.

5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

5a-CP IKU : Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola

Barang terhadap objek BMN yang sama. Deviasi ketergunaan hasil penilaian pada KPKNL Balikpapan tahun 2023 adalah sebesar 25% dengan realisasi deviasi sebesar 0% atau tidak terdapat deviasi.

5b-CP IKU : Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien

Target IKU Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien pada KPKNL Balikpapan tahun 2023 sebesar 70 dan berhasil meraih capaian sebesar 94,01.

6. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif

6a-CP IKU : Persentase Pelaksanaan Lelang Online

E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet sehingga diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan karena e-auction dapat menjangkau peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang.

IKU Persentase Pelaksanaan Lelang Online Pada Tahun 2023 di KPKNL Balikpapan memiliki target sebesar 90% dengan rincian realisasi frekuensi pelaksanaan e-Auction sebanyak 783 kali, jumlah permohonan lelang online sebanyak 812 permohonan, dan permohonan lelang sebanyak 906 permohonan.

6b-CP IKU : Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 triliun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset).

IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) pada KPKNL Balikpapan memiliki target 350 NUP dengan capaian sebanyak 388 NUP atau 133,35%.

7. Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif

7a-CP IKU : Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN merupakan bagian dari pengawasan dan pengendalian BMN sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN yang bertujuan untuk memastikan terselenggaranya pengawasan dan pengendalian BMN yang terarah dan berkelanjutan guna mewujudkan

pengelolaan BMN yang tertib, efisien, efektif, dan optima

IKU Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara KPKNL Balikpapan tahun 2023 memiliki target sebesar 86% dan capaian sebesar 92,59% dengan rincian:

- Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2023 sebanyak 48 persetujuan/penetapan dan jumlah tindak lanjut persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester I 2023 yang telah direkam pada aplikasi SIMAN sebanyak 46 persetujuan/penetapan.
- Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2023 sebanyak 33 persetujuan/penetapan dan jumlah tindak lanjut persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester I 2023 yang telah direkam pada aplikasi SIMAN sebanyak 29 persetujuan/penetapan.

8. Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif

8a-N IKU : Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik

IKU Rata-Rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik pada KPKNL Balikpapan tahun 2023 memiliki target sebesar 100 dan berhasil meraih capaian sebesar 120.

9. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN Yang Optimal

9a-Cp IKU : Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Anggaran merupakan salah satu sumber daya organisasi sektor publik/pemerintahan yang harus dikelola secara berkualitas dan ditandai dengan penyerapan anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, tercapainya output, efisiensi, konsistensi pelaksanaan anggaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan anggaran adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja. Penguatan fungsi pengelolaan keuangan dan BMN dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi. IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada KPKNL Balikpapan tahun 2023 memiliki target sebesar 100 dengan capaian sebesar 98,40.

9b-N IKU : Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan pada KPKNL Balikpapan tahun 2023 memiliki target sebesar 100% dengan capaian sebesar 222%.

9c-Cp IKU : Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

IKU Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN pada KPKNL Balikpapan tahun 2023 memiliki target batas sebesar 15% dengan capaian deviasi sebesar 0% atau tidak terdapat deviasi.

10. Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal Yang Efektif

10a-N IKU : Indeks Pengawasan dan Pengendalian Yang Efektif

IKU Indeks Pengawasan dan Pengendalian Yang Efektif pada KPKNL Balikpapan tahun 2023 memiliki target sebesar 60 dengan capaian sebesar 97,99 atau 163,32%.

11. Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi

11a-N IKU : Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko

IKU Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko bertujuan untuk mengukur kualitas pengelolaan kinerja dan manajemen risiko di DJKN. Pada tahun 2023 KPKNL Balikpapan memiliki target sebesar 80 dan mendapatkan capaian sebesar 96,74 atau 120,93% dengan rincian target Indeks Pengelolaan Kinerja sebesar 80 dengan capaian sebesar 96,98 dan target Indeks Kualitas Manajemen Risiko sebesar 60 dengan capaian sebesar 96,39.

11b-N IKU : Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai (30 JP)

IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai pada KPKNL Balikpapan tahun 2023 memiliki target sebesar 100% dan capaian sebesar 116,25% dengan rincian dari jumlah bawahan total sebanyak 32 pegawai, jumlah bawahan yang memenuhi kriteria sebanyak 31 pegawai dan jumlah bawahan yang telah melebihi kriteria sebanyak 31 pegawai.

B. KINERJA LAINNYA

Penanganan Perkara

Jumlah perkara/gugatan perdata status aktif di pengadilan yang ditangani oleh KPKNL selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Posisi perkara berdasarkan tingkat peradilan:

Tingkat 1 PN	26
Tingkat 2 Banding	8
Tingkat 3 Kasasi	18

- Posisi perkara berdasarkan jenis peradilan:

Perdata	52
Agama	0
Niaga	0

- Posisi perkara berdasarkan TGR/Non-TGR:

TGR	12
Non-TGR	40

C. REALISASI ANGGARAN

Sesuai dengan Surat Pengesahan DIPA-015.09.2.537962/2023 tanggal 30 November 2022, Pada awal tahun 2023, KPKNL Balikpapan menerima anggaran DIPA sebesar Rp2.053.220.000,-. Jumlah keseluruhan anggaran tersebut merupakan jenis belanja barang dan belanja modal. Selama periode berjalan, KPKNL Balikpapan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Setelah revisi terakhir pagu KPKNL Balikpapan menjadi sebesar Rp2.132.773.000,-.

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase
5.1	Belanja Pegawai	-	-	-
5.2	Belanja Barang	Rp 1.631.880.000,-	Rp 1.542.538.075,-	94.53%
5.3	Belanja Modal	Rp 500.893.000,-	Rp 482.591.330,-	96.35%
Total		Rp 2.132.773.000,-	Rp 2.025.129.405,-	94,95%

**PAGU DAN REALISASI ANGGARAN
KPKNL BALIKPAPAN TA 2023**

URAIAN		PAGU REVISI (Rp)	REALISASI	
			(Rp)	(%)
Jumlah Seluruhnya		2.132.773.000	2.025.129.405	94,95%
	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	377.417.000	320.835.271	85,01%
4796.AEF.001	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	2.708.000	2.708.000	100%
4796.AEF.002	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang	1.472.000	775.000	52,65%
4798.AAH.001	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	35.394.000	25.579.300	73,37%
4798.AAH.002	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	12.860.000	11.323.900	88,06%
4798.AAH.003	Risalah Lelang	28.914.000	26.573.400	91,90%
4798.AAH.301	Risalah Lelang Sukarela UMKM (PU)	40.000.000	39.980.016	99,95%
4798.FAE.002	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	9.008.000	7.828.100	86,90%
4798.FAE.003	Rekomendasi Hasil Kajian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	41.824.000	39.123.800	93,54%
4798.FAE.004	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	12.016.000	11.087.500	98,26%
4798.FAE.005	Rekomendasi Hasil Penilaian	9.248.000	9.248.000	100%
4798.FAE.007	Penggalian Potensi Lelang	60.000.000	59.053.155	98,42%
4798.FAE.301	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipatkan (PU)	28.957.000	26.509.900	91,55%
4798.FAK.001	Aset BUN yang Dikelola	33.472.000	25.962.800	77,57%
4798.UAK.201	Aset Eks BLBI yang Dilakukan Penanganan, Penyelesaian, dan Pemulihan Hak Tagih Negara (PN)	61.544.000	34.362.400	55,83%
	Program Dukungan Manajemen	1.755.356.000	1.704.294.134	97,09%
4700.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	26.668.000	26.550.440	99,56%
4701.CAN.001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	10.600.000	6.850.000	64,62%
4701.EBA.002	Kerumahtanggaan	72.220.000	71.886.300	99,54%
4701.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.132.677.000	1.104.656.764	97,53%
4701.EBB.001	Peralatan Fasilitas Perkantoran	17.440.000	13.233.600	75,88%
4701.EBB.003	Kendaraan Bermotor	24.780.000	20.495.700	82,71%
4701.EBB.004	Gedung/Bangunan	448.073.000	442.012.030	98,65%
4702.BMB.002	Kehumasan	9.506.000	6.984.100	73,47%
4704.EBA.001	Rekomendasi Kepatuhan Internal	13.392.000	11.625.000	86,81%

BAB IV | Penutup dan Lampiran



Burung Enggang yang setia terhadap pasangannya dan menyediakan sarang dan makanan bagi induk dan anaknya dengan baik layaknya Kemenkeu yang senantiasa menyalurkan APBN kepada masyarakat untuk menciptakan kestabilan ekonomi Indonesia.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja KPKNL Balikpapan ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi KPKNL Balikpapan sebagai instansi vertikal DJKN di daerah serta upaya peningkatan good governance yang mengacu pada Rencana Strategis tahun 2020 s.d. 2024. Laporan Kinerja ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

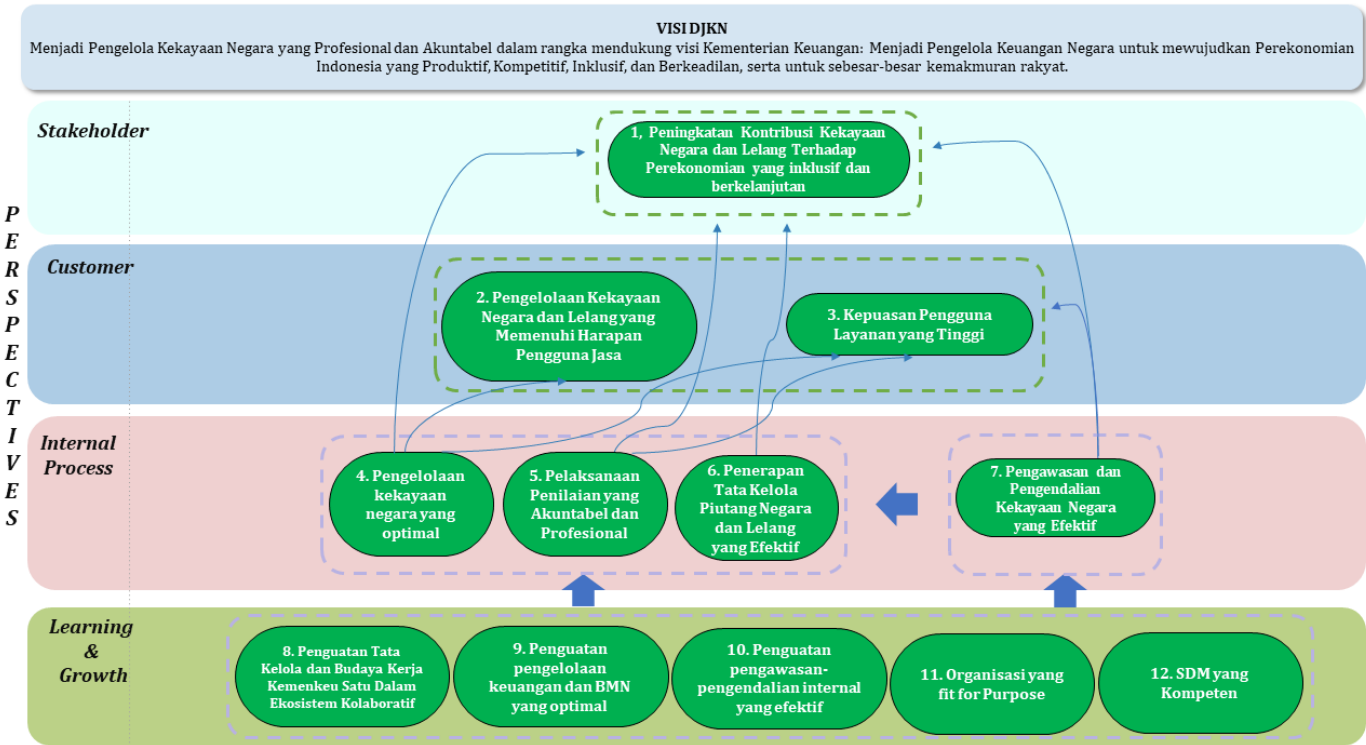
Penetapan indikator kinerja merupakan salah satu *tools* dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pencapaian kinerja merupakan perwujudan sinergi seluruh jajaran di lingkungan KPKNL Balikpapan dalam menghadapi berbagai tantangan kinerja dan dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan kepada seluruh pihak terkait mengenai tugas dan fungsi KPKNL Balikpapan, sehingga dapat memberikan *feedback* guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja tersebut harus dijadikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, sedangkan secara eksternal Laporan Kinerja harus selalu menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga capaian KPKNL Balikpapan dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-01/WKN.13/2023
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BALIKPAPAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
BALIKPAPAN
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan	1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP Persentase Produktivitas Lelang	80%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	3a-CP Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	100%
4	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	4a-CP Pengelolaan Barang Milik Negara yang Optimal	89,33%
		4b-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%
		5b-CP Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	6a-CP Persentase Pelaksanaan Lelang Online	90%
		6b-CP Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%
7	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	7a-CP Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%
8	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif	8a-N Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik	100
9	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	9a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%
		9b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%
		9c-N Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas	10%
10	Penguatan Pengawasan-	10a-CP Indeks Integritas Organisasi	94,33



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Pengendalian Internal yang Efektif	10b-N Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	60
11	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	11a-N Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80
		11b-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%

Program/ Kegiatan Tahun 2023

Anggaran

Program :

Pengelolaan Perbendaharaan , Kekayaan Negara dan Risiko

Rp 297.864.000,00

Kegiatan :

1. Komunikasi, Edukasi dan Standarisasi
- Rp 4.180.000,00
2. Pengelolaan Aset
- Rp 293.684.000,00

Program :

Dukungan Manajemen

Rp 1.755.356.000,00

Kegiatan :

1. Legislasi dan Litigasi
- Rp 26.668.000,00
2. Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum
- Rp 1.705.790.000,00
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik
- Rp 9.506.000,00
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal
- Rp 13.392.000,00

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan
Negara Kalimantan Timur dan Utara



Ditandatangani Secara Elektronik
Kusumawardhani

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Balikpapan



Ditandatangani Secara Elektronik
Yoshua Wisnungkara



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
BALIKPAPAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan							
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	30%	45%	45%	60%	60%	80%	80%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							
3a-CP	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	3%	7%	7%	11%	11%	100%	100%
4	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
4a-CP	Pengelolaan Barang Milik Negara yang Optimal	12%	40,67 %	40,67 %	63,33 %	63,33 %	89,33 %	89,33%
4b-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
5b-CP	Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	70	70	70	70	70	70
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
6a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang Online	57%	67%	67%	78,5 %	78,5 %	90%	90%
6b-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
7	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif							
7a-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	-	50%	50%	-	50%	86%	86%
8	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif							
8a-N	Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik	100	100	100	100	100	100	100



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
9	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							
9a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	95,5 %	95,5 %	95,5 %	95,5 %	95,5%	95,5%
9b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	10%	50%	50%	85%	85%	100%	100%
9c-N	Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas	-	-	-	-	-	10%	10%
10	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif							
10a-CP	Indeks Integritas Organisasi	-	-	-	-	-	94,33	94,33
10b-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	-	-	-	-	-	60	60
11	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
11a-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	-	-	-	-	-	80	80
11b-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
Dan Lelang Balikpapan,



Ditandatangani Secara Elektronik
Yoshua Wisnungkara



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Kompetisi Kedai Lelang UMKM	Pemberdayaan UMKM sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat luas	Q1 : Inventarisasi dan Penggalian Potensi UMKM yang akan berpartisipasi dalam kegiatan	Q1 : Daftar UMKM yang berpartisipasi dalam kegiatan	Q1 s.d Q4 2023	Kelompok Jabatan Fungsional Pelelang / Tim Kedai Lelang UMKM KPKNL Balikpapan	-
				Q2 : Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q2 : Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q3 : Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q3 : Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q4 : Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Q4 : Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan			

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Balikpapan



Ditandatangani Secara Elektronik
Yoshua Wisnungkara



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Yoshua Wisnungkara, S.E., Ak., M.A.		NAMA	Kusumawardhani
NIP	197602162002121001		NIP	196908231996032001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina, IV/a		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda, IV/c
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Balikpapan		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	Penerima Layanan
		Persentase Produktivitas Lelang	80%	Penerima Layanan
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	Penerima Layanan
		Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	Penerima Layanan



3.	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	100%	Penerima Layanan
4.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Pengelolaan Barang Milik Negara yang Optimal	89,33%	Proses Bisnis
		Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	Proses Bisnis
5.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	Proses Bisnis
		Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	Proses Bisnis
6.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Persentase Pelaksanaan Lelang Online	90%	Proses Bisnis
		Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	15%	Proses Bisnis
7.	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%	Proses Bisnis
8.	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik	100	Penguatan Internal atau Anggaran



9.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas	10%	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Indeks Integritas Organisasi	94,33	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	60	Penguatan Internal atau Anggaran
11.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
	Akuntabel	



PERILAKU KERJA		
2	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
	Adaptif	



PERILAKU KERJA		
6	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

31 Januari 2023

Pegawa



Ditandatangani secara elektronik

Yoshua Wisnungkara
197602162002121001



Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Kusumawardhani
196908231996032001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	34 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
2	Persentase Produktivitas Lelang	30%	45%	45%	60%	60%	80%	80%
3	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
4	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
5	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	3%	7%	7%	11%	11%	100%	100%
6	Pengelolaan Barang Milik Negara yang Optimal	12%	40,67 %	40,67%	63,33 %	63,33%	89,33 %	89,33 %



7	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
8	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
9	Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	70	70	70	70	70	70
10	Persentase Pelaksanaan Lelang Online	57%	67%	67%	78,5%	78,5%	90%	90%
11	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
12	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	-	50%	50%	-	-	86%	86%
13	Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik	100	100	100	100	100	100	100
14	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5 %	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%
15	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	10%	50%	50%	85%	85%	100%	100%
16	Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas	-	-	-	-	-	10%	10%
17	Indeks Integritas Organisasi	-	-	-	-	-	94,33	94,33
18	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	-	-	-	-	-	60	60
19	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	-	-	-	-	-	80	80



	20	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
KONSEKUENSI									
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>								
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>								

31 Januari 2023

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Yoshua Wisnungkara
197602162002121001



Ditandatangani secara elektronik

Kusumawardhani
196908231996032001

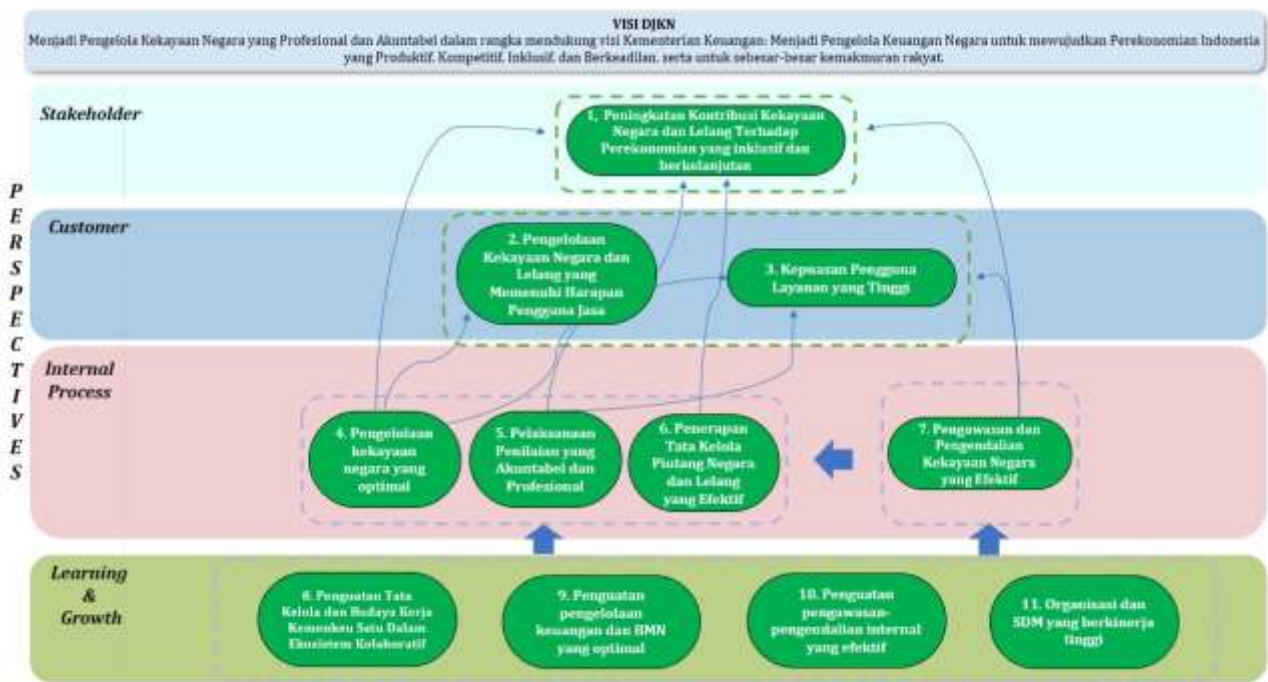


ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

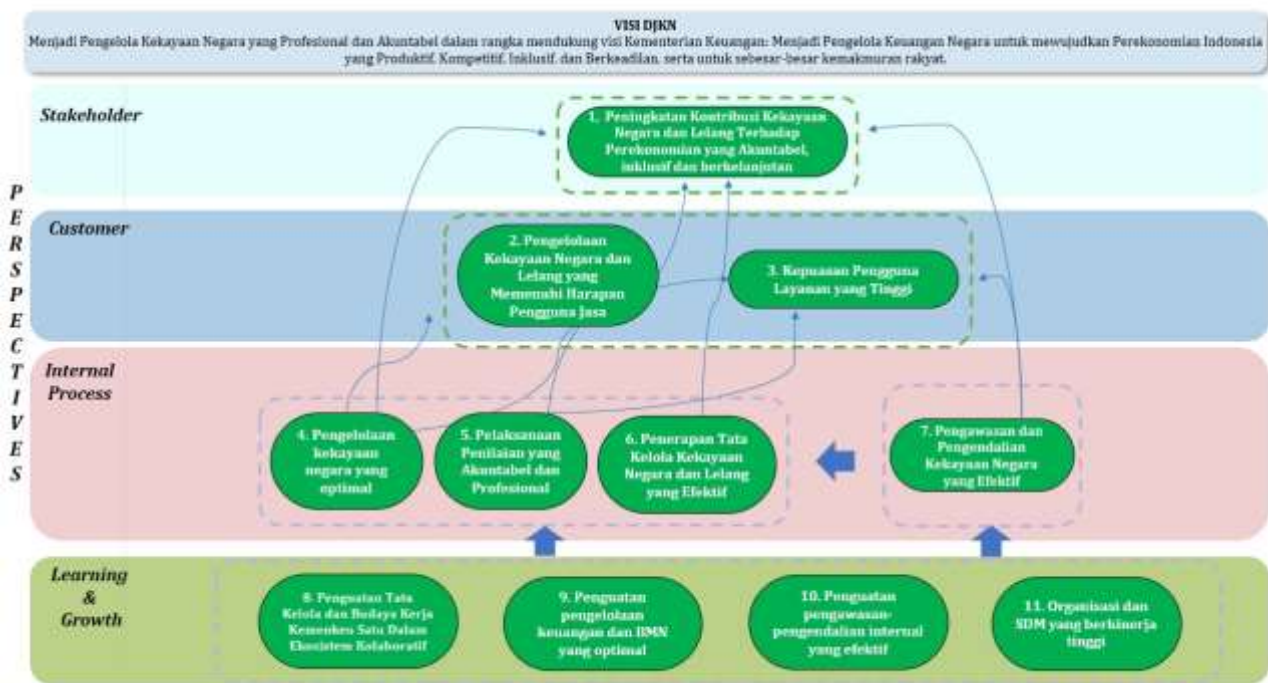
NOMOR: PK-01A/WKN.13/2023

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Perjanjian Kinerja nomor PK-01/WKN.13/2023 tanggal 31 Januari 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Peta Strategis sebelum adendum:



Peta Strategis setelah adendum:



a. Perubahan Sasaran Strategis

Sebelum		Menjadi	
Kode SS	Sasaran Strategis	Kode SS	Sasaran Strategis
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan	1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	6	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif

b. Reposisi Indikator Kinerja Utama antar Sasaran Strategis dan Perubahan Wording IKU

Sebelum						Menjadi					
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	s.d Q3	Q4	Y			Q3	s.d Q3	Q4	Y
Learning and growth perspective						Stakeholder perspective					
10	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif					1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan				
10a-CP	Indeks integritas organisasi	-	-	94,33	94,33	1c-CP	Indeks integritas	-	-	88,67	88,67

c. Reposisi Indikator Kinerja Utama antar Sasaran Strategis

Sebelum						Menjadi					
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	s.d Q3	Q4	Y			Q3	s.d Q3	Q4	Y
Internal process perspective						Learning and growth perspective					
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif					9	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal				
6b-CP	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	15%	15%	15%	15%	9c-CP	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	15%	15%	15%	15%

d. Perubahan Nama IKU

Sebelum		Menjadi	
Kode IKU/ Sub-IKU	Nama IKU/Sub-IKU	Kode IKU/ Sub-IKU	Nama IKU/Sub-IKU
4a-CP	Pengelolaan BMN yang Optimal	4a-CP	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan BMN

e. Penambahan IKU

Sebelum	Menjadi						Penjelasan
	Kode IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target				
			Q3	s.d. Q3	Q4	Y	
-	6b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	75%	75%	100%	100%	IKU baru

f. Penghapusan IKU

Sebelum		Menjadi	Penjelasan
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama		
9c-N	Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas	-	IKU dihapus dari PK Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan

g. Perubahan Trajectory Target IKU

Sebelum						Menjadi					
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	s.d Q3	Q4	Y			Q3	s.d Q3	Q4	Y
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	60%	60%	80%	80%	1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	80%	80%	80%	80%
10a-CP	Indeks integritas organisasi	-	-	94,33	94,33	1c-CP	Indeks integritas	-	-	88,67	88,67
4a-CP	Pengelolaan BMN yang Optimal	63,33%	63,33%	89,33 %	89,33 %	4a-CP	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan BMN	57,5%	57,5%	84%	84%
9a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	9a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100
9b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	85%	85%	100%	100%	9b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	-	100%	100%

h. Perubahan Kode IKU

Kode IKU		Indikator Kinerja Utama
Sebelum	Menjadi	
10b-N	10a-N	
		Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

Adendum PK ini mulai berlaku pada 1 Juli tahun 2023.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara



Ditandatangani Secara Elektronik
Jose Arif Lukito

Samarinda, 27 September 2023
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang Balikpapan



Ditandatangani Secara Elektronik
Adi Suharna



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 16 Juni s.d. 31 Desember Tahun 2023

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA			
NAMA	Adi Suharna		NAMA	Jose Arif Lukito		
NIP	197207161994031003		NIP	197109121996031001		
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda, IV/c		
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Balikpapan		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara		
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara		
NO	RENCANA HASIL KERJA		INDIKATOR KINERJA INDIVIDU		TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
A. UTAMA						
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)		Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang		75,93%	Penerima Layanan
			Persentase Produktivitas Lelang		80%	Penerima Layanan
			Indeks Integritas		88,67	Penerima Layanan

2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Persentase Realisasi Pokok Lelang	75,64%	Penerima Layanan
		Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	63,43%	Penerima Layanan
3.	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	100%	Penerima Layanan
4.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Negara	84%	Proses Bisnis
		Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	22,22%	Proses Bisnis
5.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	Proses Bisnis
		Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	Proses Bisnis
6.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Persentase Pelaksanaan Lelang Online	90%	Proses Bisnis
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	66,28%	Proses Bisnis

7.	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	18,10%	Proses Bisnis
8.	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik	100	Penguatan Internal atau Anggaran
9.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	60	Penguatan Internal atau Anggaran

11.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.

PERILAKU KERJA		
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.

PERILAKU KERJA		
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Pegawai yang Dinilai,

Samarinda, 27 September 2023

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Adi Suharna
197207161994031003



Ditandatangani secara elektronik

Jose Arif Lukito
197109121996031001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 16 Juni s.d. 31 Desember Tahun 2023

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	34 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	-	-	-	41,87%	41,87%	75,93%	75,93%
2	Persentase Produktivitas Lelang	-	-	-	80%	80%	80%	80%
3	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	88,67	88,67
4	Persentase Realisasi Pokok Lelang	-	-	-	61,28%	61,28%	75,64%	75,64%
5	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	-	-	-	23,43%	23,43%	63,43%	63,43%
6	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	-	-	-	11%	11%	100%	100%

	7	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	57,5%	57,5%	84%	84%
	8	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	-	-	-	13,33%	13,33%	22,22%	22,22%
	9	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	-	-	-	25%	25%	25%	25%
	10	Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	-	-	-	70	70	70	70
	11	Persentase Pelaksanaan Lelang Online	-	-	-	78,5%	78,5%	90%	90%
	12	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	-	-	-	49,71%	49,71%	66,28%	66,28%
	13	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	-	-	18,10%	18,10%
	14	Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik	-	-	-	100	100	100	100
	15	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	-	-	-	100	100	100	100
	16	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	-	-	-	-	100%	100%
	17	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	-	-	-	15%	15%	15%	15%
	18	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	-	-	-	-	-	60	60

19	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	-	-	-	-	-	80	80
20	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	-	-	-	75%	75%	100%	100%
KONSEKUENSI								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

Samarinda, 27 September 2023

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Adi Suharna

197602162002121001



Ditandatangani secara elektronik

Jose Arif Lukito

196908231996032001



DATA CAPAIAN KINERJA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
s.d. TRIWULAN II
TAHUN 2023

	Kode IKU		URAIAN	Target 2023	Target Q1 2023	Capaian Q1	Target Q2 2023	Capaian Q2	Capaian sd. Semester 1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)
1	-		Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan						
	1a-CP	P/M	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	MAX/TLK					
	a.		Target/Realisasi PNBPN BMN	Rp 9.725.000.000	Rp 972.500.000	Rp 1.045.699.498	Rp 2.917.500.000	Rp 2.211.360.688	Rp 2.211.360.688
	b.		Target/Realisasi PNBPN Piutang Negara	Rp 62.500.000	Rp 6.250.000	Rp 16.077.412	Rp 18.750.000	Rp 32.650.074	Rp 32.650.074
	c.		Target/Realisasi PNBPN Lelang	Rp 8.500.000.000	Rp 850.000.000	Rp 1.264.452.574	Rp 2.550.000.000	Rp 2.700.726.348	Rp 2.700.726.348
	TOTAL		Jumlah target/realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Rp 18.287.500.000	Rp 1.828.750.000	Rp 2.326.229.484	Rp 5.486.250.000	Rp 4.944.737.110	Rp 4.944.737.110
			Capaian IKU			12,72%		27,04%	27,04%
	1b-CP	P/M	Persentase produktivitas lelang	MAX/TLK					
	a		Total Lot laku Lelang			105,00%		105,00%	105,00%
			Jumlah Frekuensi lelang	748		167		312	312
			% Frekuensi Lelang			22,33%		41,71%	41,71%
			Capaian IKU	-		55,40%		67,03%	67,03%
2	-		Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa						
	2a-CP	P/M	Persentase Realisasi Pokok Lelang	MAX/TLK					
			Target/Realisasi Pokok Lelang Pejabat Kelas I	Rp 95.480.000.000	Rp 19.096.000.000	Rp 24.519.258.297	Rp 38.192.000.000	Rp 46.409.265.773	Rp 46.409.265.773
			Target/Realisasi Pokok Lelang Pegadaian	Rp 234.020.000.000	Rp 46.804.000.000	Rp 10.968.238.600	Rp 93.608.000.000	Rp 38.404.832.900	Rp 38.404.832.900
			Target/Realisasi Pokok Lelang	Rp 329.500.000.000	Rp 65.900.000.000	Rp 35.487.496.897	Rp 131.800.000.000	Rp 84.814.098.673	Rp 84.814.098.673
			Capaian IKU			10,77%		25,74%	25,74%
	2b-CP	P/M	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	MAX/TLK					
			Target/Realisasi Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	Rp 1.850.000.000	Rp 185.000.000	Rp 477.963.376	Rp 555.000.000	Rp 685.581.636	Rp 685.581.636
			Capaian IKU			25,84%		37,06%	37,06%
3	-		Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi						

	3a-CP	P/M	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	MAX/TLK					
			Target/Realisasi Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	100%	3%	5,11%	7%	10,23%	10%
			Capaian IKU			5,11%		10,23%	10,23%
4	-		Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal						
	4a-CP	P/L	Pengelolaan BMN yang optimal	MAX/TLK					
			Target/Realisasi Pengelolaan BMN yang optimal	89,33%	12%	59,30%	40,67%	90,92%	90,92%
			Capaian IKU			59,30%		90,92%	90,92%
	4a1-CP	P/L	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	MAX/TLK					
			Target/Realisasi Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	68%	0%	48,97%	50%	61,16%	61,16%
			Capaian Sub IKU			48,97%		61,16%	61,16%
	4a2-CP	P/L	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan	MAX/TLK					
			Target/Realisasi Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan	155	0%	27		55	55
			Capaian Sub IKU	-		17,42%	40,00%	35,48%	35,48%
	4a3-CP	P/M	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	MAX/TLK					
			Target/Realisasi Aset yang dievaluasi kinerjanya dan disampaikan rekomendasinya	334	0	48	107	109	109
			Target/Realisasi Rekomendasi Evaluasi Kinerja yang ditindaklanjuti satker	2	0	10	1	15	15
			TOTAL	336		58	108	124	124
			Capaian Sub IKU	-		111,50%		176,11%	
	4b-CP	P/M	Persentase Penyelesaian (Berkas Kasus Piutang Negara) BKPN	MAX/TLK					
			Target/Realisasi Persentase Penyelesaian (Berkas Kasus Piutang Negara) BKPN	18	2	3	6	14	14
			Capaian IKU			16,67%		77,78%	77,78%
5	-		Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional						
	5a-CP	P/M	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	MIN/TLK					
			Target/Realisasi Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%	25%	0,00%	25%	0,00%	0,00%
			Capaian IKU			0,00%		0,00%	0,00%

	5b-CP	E/M	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	Max/AVG					
			Target/Realisasi Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	70	91,58	70	95,97	93,77
			Capaian IKU			91,58		95,97	93,77
6	-		Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif						
	6a-CP	P/L	Persentase Pelaksanaan Lelang Online	MAX/TLK					
			Persentase Pelaksanaan Lelang Online	90%	57%				
			Target/Realisasi Persentase Pelaksanaan Lelang Online	90%	57%	100%	67%	95,96%	95,96%
			Capaian IKU			100,00%		95,96%	95,96%
	6a1-CP	P/M	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	MAX/TLK					
			Realisasi Frekuensi e-Auction			167		312	312
			Realisasi Frekuensi e-Conventional Auction			0		0	0
			Capaian realisasi e-Auction			100,00%		100,00%	100,00%
			Capaian Realisasi e-Conventional Auction			0,00%		0,00%	0,00%
			Jumlah Target/Realisasi pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction			100,00%	94,00%	100,00%	100,00%
			Capaian Sub IKU			100,00%		100,00%	100,00%
	6a2-CP	P/M	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang online	MAX/TLK					
			Jumlah permohonan lelang online			157		356	356
			Jumlah permohonan lelang			167		371	371
			Jumlah Target/Realisasi pelaksanaan permohonan lelang online	86%		94,01%	40,00%	95,96%	95,96%
			Capaian Sub IKU			94,01%		95,96%	95,96%
	6b-CP	P/M	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	MIN/TLK					
			Target/Realisasi Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	15%	15%	0,00%	15%	0,00%	0,00%
			Capaian IKU			0,00%		0,00%	0,00%
7	-		Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif						
	7a-CP	P/M	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	MAX/TLK					
	a		Jumlah Tindak lanjut persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2022 yang telah direkam pada aplikasi SIMAN			28		28	28
			Jumlah Tindak lanjut persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester I 2023 yang telah direkam pada aplikasi SIMAN			2		27	27

	b		Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2022			33		33	33
			Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2023			21		48	48
			Target/Realisasi Jumlah indak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	86%	-	55,56%	50%	67,90%	67,90%
			Capaian IKU	-		-		78,95%	78,95%
8	-		Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif						
	8a-N	P/M	Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik	Max/TLK					
			Target/Realisasi Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik	100	100	120	100	120	120
			Capaian IKU			120%		120%	120%
9	-		Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal						
	9a-CP	P/M	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Max/TLK					
			Target/Realisasi Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,5%	95,50%	95,50%	91,27%	91,27%
			Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95,50%	95,50%	95,50%	95,50%	91,27%	91,27%
			Capaian IKU	-		95,50%		91,27%	91,27%
	9b-CP	P/M	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	Max/TLK					
			Target/Realisasi Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	10%				
			Capaian IKU						
	9c-N	P/L	Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas	Min/AVG					
			Target/Realisasi Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas	10%	-				
			Capaian IKU						
10	-		Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif						
	10a-CP	P/L	Indeks Integritas Organisasi	Max/TLK					
			Target/Realisasi Indeks Integritas Organisasi	94,33	-				
			Capaian IKU						
	10a1-CP	P/L	Indeks Integritas	Max/AVG					
			Indeks Integritas	88,67	-				
			Capaian Sub IKU						
	10a2-CP	P/M	Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Max/AVG					
			Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP	100	-				
			Capaian Sub IKU						

	10b-N	P/M	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	Max/AVG				
			Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	60	-			
			Capaian IKU					
11	-		Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi					
	11a-N	P/M	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	MAX/TLK				
			Indeks Pengelolaan Kinerja	80	-			
			Indeks Kualitas Manajemen Risiko	80	-			
			Nilai Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	-			
			Capaian IKU	80				
	11b-N	P/M	Persentase pengembangan kompetensi pegawai (30 JP)	MAX/TLK				
			Jumlah bawahan yang memenuhi kriteria		18		31	31
			Jumlah bawahan yang telah melebihi kriteria		18		31	31
			Jumlah bawahan total		30		31	31
			% Capaian Utama		15%	60,00%	40,00%	100,00%
			% Capaian Tambahan		15%	60,00%	40,00%	100,00%
			Capaian IKU	100%		72,00%	120,00%	120,00%

Mengetahui,



alikipapan

Ditandatangani secara elektronik

Adi Suharna

NIP 19720716 199403 1 003



patuhan Internal

Ditandatangani secara elektronik

Sigit Among Wibowo

NIP 19760905 199603 1 001



DATA CAPAIAN KINERJA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
s.d. TRIWULAN IV
TAHUN 2023

	Kode IKU		URAIAN	Target 2023	Target Q3 2023	Capaian Q3	Capaian s.d. Q3	Target Q4 2023	Capaian Q4	Capaian sd. Q4 (Tahun 2023)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(9)	(10)		(11)	(12)
1	-		Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan							
	1a-CP	P/M	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	MAX/TLK						
	a.		Target/Realisasi PNBPN BMN	Rp 9.725.000.000	Rp 5.835.000.000	Rp 3.426.737.213	Rp 3.426.737.213	Rp 9.725.000.000	Rp 5.213.314.179	Rp 5.213.314.179
	b.		Target/Realisasi PNBPN Piutang Negara	Rp 62.500.000	Rp 37.500.000	Rp 49.471.467	Rp 49.471.467	Rp 62.500.000	Rp 66.235.977	Rp 66.235.977
	c.		Target/Realisasi PNBPN Lelang	Rp 8.500.000.000	Rp 5.100.000.000	Rp 4.150.369.871	Rp 4.150.369.871	Rp 8.500.000.000	Rp 10.237.585.366	Rp 10.237.585.366
	TOTAL		Jumlah target/realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Rp 18.287.500.000	Rp 10.972.500.000	Rp 7.626.578.551	Rp 7.626.578.551	Rp 18.287.500.000	Rp 15.517.135.522	Rp 15.517.135.522
			Capaian IKU			41,70%	41,70%		84,85%	84,85%
	1b-CP	P/M	Persentase produktivitas lelang	MAX/TLK						
			Total Lot laku Lelang			105,00%	105,00%		105,00%	105%
			Jumlah Frekuensi lelang	748		516	516		783	783
			% Frekuensi Lelang			68,98%	68,98%		104,68%	104,68%
			Capaian IKU	-		83,39%	83,39%		104,81%	104,81%
	1c-CP	P/L	Indeks Integritas	Max/TLK						
			Target/Realisasi Indeks Integritas	88,67				88,67	89,17	89,17
			Capaian IKU						100,56%	100,56%
2	-		Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2a-CP	P/M	Persentase Realisasi Pokok Lelang	MAX/TLK						
			Target/Realisasi Pokok Lelang Pejabat Kelas I	Rp 95.480.000.000	Rp 66.836.000.000	Rp 73.440.534.400	Rp 73.440.534.400	Rp 95.480.000.000	Rp 202.120.635.205	Rp 202.120.635.205
			Target/Realisasi Pokok Lelang Pegadaian	Rp 234.020.000.000	Rp 163.814.000.000	Rp 64.128.669.316	Rp 64.128.669.316	Rp 234.020.000.000	Rp 126.471.886.700	Rp 126.471.886.700
			Target/Realisasi Pokok Lelang	Rp 329.500.000.000	Rp 230.650.000.000	Rp 137.569.203.716	Rp 137.569.203.716	Rp 329.500.000.000	Rp 328.592.521.905	Rp 328.592.521.905
			Capaian IKU			41,75%	41,75%		99,72%	99,72%
	2b-CP	P/M	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	MAX/TLK						
			Target/Realisasi Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	Rp 1.850.000.000	Rp 1.110.000.000	Rp 1.082.567.642	Rp 1.082.567.642	Rp 1.850.000.000	Rp 1.859.273.064	Rp 1.859.273.064
			Capaian IKU			58,52%	58,52%		100,50%	100,50%
3	-		Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							
	3a-CP	P/M	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	MAX/TLK						
			Target/Realisasi Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	100%	11%	11,93%	11,93%	100%	106,40%	106,40%
			Capaian IKU			11,93%	11,93%		106,40%	106,40%

4	-		Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal						
	4a-CP	P/L	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan BMN	MAX/TLK					
			Target/Realisasi Tingkat Optimalisasi Pengelolaan BMN	84,00%	57,50%	58,93%	58,93%	84,00%	99,78%
			Capaian IKU			58,93%	58,93%		99,78%
	4a1-CP	P/L	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	MAX/TLK					
			Target/Realisasi Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	68%	55%	61,73%	61,73%	68%	64,07%
			Capaian Sub IKU			61,73%	61,73%		64,07%
	4a2-CP	P/L	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipkatkan	MAX/TLK					
			Target/Realisasi Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipkatkan	155	93	87	87	155	210
			Capaian Sub IKU	-		56,13%	56,13%		135,48%
	4b-CP	P/M	Persentase Penyelesaian (Berkas Kasus Piutang Negara) BKPN	MAX/TLK					
			Target/Realisasi Persentase Penyelesaian (Berkas Kasus Piutang Negara) BKPN	22	14	17	17	22	35
			Capaian IKU			77,27%	77,27%		159,09%
5	-		Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional						
	5a-CP	P/M	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	MIN/TLK					
			Target/Realisasi Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%	25%	0,00%	0,00%	25%	0,00%
			Capaian IKU			0,00%	0,00%		0,00%
	5b-CP	P/M	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	Max/AVG					
			Target/Realisasi Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	70	94,37	93,45	70	95,72
			Capaian IKU			94,37	93,45		95,72
6	-		Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif						
	6a-CP	P/L	Persentase Pelaksanaan Lelang Online	MAX/TLK					
			Target/Realisasi Persentase Pelaksanaan Lelang Online	90%	78,5%	96,92%	96,92%	90%	94,81%
			Capaian IKU			96,92%	96,92%		94,81%
	6a1-CP	P/M	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	MAX/TLK					
			Realisasi Frekuensi e-Auction			516	516		783
			Realisasi Frekuensi e-Conventional Auction			0	0		0
			Capaian realisasi e-Auction			100,00%	100,00%		100,00%
			Capaian Realisasi e-Conventional Auction			0,00%	0,00%		0,00%
			Jumlah Target/Realisasi pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	94%	94%	100,00%	100,00%	94%	100,00%
			Capaian Sub IKU			100,00%	100,00%		100,00%
	6a2-CP	P/M	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang online	MAX/TLK					
			Jumlah permohonan lelang online			564	564		812
			Jumlah permohonan lelang			601	601		906

		Jumlah Target/Realisasi pelaksanaan permohonan lelang online	86%	63%	93,84%	93,84%	86%	89,62%	89,62%
		Capaian Sub IKU			93,84%	93,84%		89,62%	89,62%
	6b-CP	P/M	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	MAX/TLK					
			Target/Realisasi Aset yang dievaluasi kinerjanya dan disampaikan rekomendasiknya (NUP)	334	251	237	237	334	348
			Target/Realisasi Rekomendasi Evaluasi Kinerja yang ditindaklanjuti satker (Paket)	16	12	15	15	16	41
			Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100,00%		75,52%	75,52%	134,60%	134,60%
			Capaian IKU	-		75,52%	75,52%	134,60%	134,60%
7	-		Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif						
	7a-CP	P/M	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	MAX/TLK					
	a		Jumlah Tindak lanjut persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2022 yang telah direkam pada aplikasi SIMAN			29	29	29	29
			Jumlah Tindak lanjut persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester I 2023 yang telah direkam pada aplikasi SIMAN			31	31	46	46
	b		Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2022			33	33	33	33
			Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2023			48	48	48	48
			Target/Realisasi Jumlah tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	86%	50,00%	74,07%	74,07%	86%	92,59%
			Capaian IKU	-		74,07%	74,07%	92,59%	92,59%
8	-		Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif						
	8a-N	P/M	Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik	Max/TLK					
			Target/Realisasi Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik	100	100	120	120	100	120
			Capaian IKU			120	120	120	120
9	-		Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal						
	9a-CP	P/M	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Max/TLK					
			Nilai Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran			97,19	97,19	94,26	94,26
			Realisasi IKU IKKPA	100	100	113,52	113,52	100	98,40
			Capaian IKU	-		113,52	113,52	98,40	98,40
	9b-N	P/M	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	Max/TLK					
			Target/Realisasi Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%			100%	222,00%	222,00%
			Capaian IKU					222,00%	222,00%
	9c-CP	P/M	Deviasi Data PNBFP Fungsional DIKN	MIN/TLK					
			Target/Realisasi Deviasi Data PNBFP Fungsional DIKN	15%	15%	0,00%	0,00%	15%	0,00%
			Capaian IKU			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

10	-		Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif						
	10a-N	P/M	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	Max/AVG					
			Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	60			60	97,99	97,99
			Capaian IKU					163,32%	163,32%
11	-		Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi						
	11a-N	P/M	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	MAX/TLK					
			Indeks Pengelolaan Kinerja	80			80	96,98	96,98
			Indeks Kualitas Manajemen Risiko	80			80	96,39	96,39
			Nilai Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80			80	96,74	96,74
			Capaian IKU				0	120,93%	120,93%
	11b-N	P/M	Persentase pengembangan kompetensi pegawai (30 JP)	MAX/TLK					
			Jumlah bawahan yang memenuhi kriteria		31	31		31	31
			Jumlah bawahan yang telah melebihi kriteria		31	31		31	31
			Jumlah bawahan total		31	31		32	32
			% Capaian Utama		100,00%	100,00%		96,88%	96,88%
			% Capaian Tambahan		100,00%	100,00%		96,88%	96,88%
			Capaian IKU	100%	75,00%	120,00%	120,00%	100%	116,25%



Capaian

Ditandatangani secara elektronik
Adi Suharna
NIP 19720716 199403 1 003



Man Internal

Ditandatangani secara elektronik
Sigit Among Wibowo
NIP 19760905 199603 1 001



NILAI KINERJA ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA BALIKPAPAN
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
PERIODE S.D. 31 DESEMBER
TAHUN 2023

Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective(30%)	30%						30,50%	
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan							101,67%	
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100%	84,85%	14%	30%	84,85%	84,85%	kuning
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	80%	104,81%	14%	30%	131,01%	120,00%	hijau
1c-CP	Indeks Integritas	P/L	88,67	89,17	19%	40%	100,56%	100,56%	hijau
	Customer Perspective(20%)	20%						20,65%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							100,11%	
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	100%	99,72%	14%	50%	99,72%	99,72%	kuning
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	P/M	100%	100,50%	14%	50%	100,50%	100,50%	hijau
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							106,40%	
3a-CP	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	P/M	100%	106,40%	14%	100%	106,40%	106,40%	hijau
	Internal Process Perspective (25%)	25%						28,93%	
4	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							119,30%	
4a-CP	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan BMN	P/L	84%	99,78%	19%	58%	118,78%	118,78%	hijau
4b-CP	Persentase Penyelesaian (Berkas Kasus Piutang Negara) BKPN	P/M	100%	159,09%	14%	42%	159,09%	120,00%	hijau
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							120,00%	
5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	25%	0,00%	14%	50%	200,00%	120,00%	hijau
5b-CP	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	P/M	70	94,01	14%	50%	134,30%	120,00%	hijau
6	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif							111,56%	
6a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang Online	P/L	90,00%	94,81%	19%	58%	105,35%	105,35%	hijau
6b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	P/M	100,00%	134,60%	14%	42%	134,60%	120,00%	hijau
7	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif							107,67%	
7a-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	P/M	86%	92,59%	14%	100%	107,67%	107,67%	hijau
8	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif							120,00%	
8a-N	Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik	P/M	100	120	14%	100%	120,00%	120,00%	hijau
	Learning & Growth Perspective (25%)	25%						29,24%	
9	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							112,80%	
9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	100	98,40	14%	33%	98,40%	98,40%	kuning
9b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	P/M	100,00%	222,00%	14%	33%	222,00%	120,00%	hijau
9c-CP	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	P/M	15%	0,00%	14%	33%	200,00%	120,00%	hijau
10	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif							120,00%	
10a-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	P/M	60,00	97,99	14%	100%	163,32%	120,00%	hijau
11	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi							118,13%	
11a-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	P/M	80,00	96,74	14%	50%	120,93%	120,00%	hijau
11b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai (30 JP)	P/M	100%	116,25%	14%	50%	116,25%	116,25%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								109,32%	hijau

Mengetahui,
Kepala KPKNL Balikpapan

Kepala Seksi Kepatuhan Internal



Ditandatangani secara elektronik
 Agus Suharna
 NIP 1970716 199403 1 003



Ditandatangani secara elektronik
 Sigit Among Wibowo
 NIP 19760905 199603 1 001

